

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Diskominfo Kota Tangerang merupakan perangkat daerah yang berperan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Instansi ini berada di wilayah Kota Tangerang dan menjadi bagian dari struktur organisasi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan teknologi informasi serta komunikasi publik. Pembentukan dan penguatan kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang secara resmi mengacu pada kebijakan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, yang mulai diberlakukan pada tahun 2016. Pembentukan instansi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah daerah dalam merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, efektif, dan efisien. Dalam menjalankan perannya, Diskominfo melaksanakan berbagai kegiatan teknis, seperti pengelolaan infrastruktur jaringan, integrasi sistem informasi, serta penyediaan layanan komunikasi publik yang terkoordinasi, sehingga mampu mendukung modernisasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik [10].

Seiring dengan berkembangnya agenda transformasi digital di tingkat nasional, Diskominfo Kota Tangerang semakin memperkuat perannya dalam mendukung implementasi SPBE. SPBE merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi [11]. Dalam pelaksanaannya, Diskominfo bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, termasuk jaringan komunikasi data antarperangkat daerah, pengelolaan pusat data (data center),

pengamanan sistem informasi, serta pengawasan integrasi aplikasi layanan pemerintahan. Peran ini menempatkan Diskominfo sebagai koordinator teknis yang memastikan seluruh perangkat daerah dapat menjalankan sistem digital secara terpadu dan berkesinambungan. Identitas pengabdian ini secara resmi direpresentasikan melalui logo Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang. Logo tersebut mengandung makna filosofis yang selaras dengan nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan inovasi yang dijunjung tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas teknis maupun koordinatif di lingkungan pemerintahan.



Gambar 2.1 Logo Diskominfo Kota Tangerang

Sumber : [10]

Selain fungsi teknisnya di bidang infrastruktur dan aplikasi, Diskominfo Kota Tangerang juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik dan komunikasi pemerintahan. Instansi ini mengelola berbagai kanal komunikasi resmi pemerintah daerah, seperti portal *website*, media sosial, dan platform layanan digital lainnya, guna menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat. Melalui pengelolaan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses, Diskominfo berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi publik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Fungsi ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan transparansi yang menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan modern [10].

2.1.1 Visi Misi

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang berorientasi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi, transparan, efektif, dan terintegrasi [10]. Visi ini menegaskan komitmen instansi

dalam mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai fondasi utama peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan sistem birokrasi yang akuntabel. Melalui visi tersebut, Diskominfo berperan sebagai penggerak transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Misi Diskominfo Kota Tangerang dijabarkan dalam beberapa arah strategis yang mendukung pencapaian visi tersebut. Pertama, mengembangkan dan mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang andal, aman, serta terintegrasi antarperangkat daerah [10]. Kedua, meningkatkan kualitas layanan aplikasi pemerintahan guna mendukung implementasi SPBE secara efektif dan efisien. Ketiga, memperkuat pengelolaan informasi publik melalui penyediaan kanal komunikasi yang transparan, responsif, dan mudah diakses masyarakat. Keempat, meningkatkan keamanan informasi serta pengelolaan data statistik sektoral untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Secara keseluruhan, visi dan misi tersebut mencerminkan komitmen Diskominfo dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang modern dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis digital[10].

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dibentuk demi mendukung efisiensi pelayanan yang selaras dengan program digitalisasi daerah. Posisi Kepala Dinas bertindak sebagai pengambil keputusan tertinggi terkait kebijakan dan pengendalian operasional. Di bawahnya, terdapat Sekretariat yang mengoordinasikan Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Subbagian Perencanaan dan Keuangan untuk menangani seluruh aspek manajemen kantor, anggaran, SDM, dan pelaporan kinerja.

Sektor fungsional dinas ini dibagi ke dalam tiga unit kerja teknis, meliputi Bidang Aplikasi Informatika, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, serta Bidang Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian. Ketiganya bergerak secara sinergis demi menyukseskan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Melalui kerja sama terpadu antarbidang ini, keberlanjutan tata kelola infrastruktur teknologi, aplikasi pemerintahan, dan keterbukaan informasi dapat terus dipertahankan.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Diskominfo Kota Tangerang

Sumber : [10]

Berdasarkan struktur organisasi yang ditampilkan pada Gambar 2.2, pelaksanaan kerja magang dilakukan pada Bidang Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian. Bidang ini memiliki peran strategis dalam mendukung infrastruktur digital Pemerintah Kota Tangerang. Tugas utamanya meliputi pengelolaan jaringan komunikasi data antarperangkat daerah, pemeliharaan server dan pusat data, pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung sistem, serta pengawasan keamanan jaringan.

Selain pengelolaan infrastruktur, bidang ini juga bertanggung jawab atas aspek persandian, yaitu pengamanan informasi strategis pemerintah daerah melalui penerapan sistem keamanan informasi, enkripsi data, serta mitigasi risiko terhadap ancaman siber. Dalam struktur internalnya, Bidang Sarana dan Prasarana TIK dan

Persandian umumnya terdiri atas beberapa seksi, seperti Seksi Infrastruktur Jaringan, Seksi Pengelolaan Pusat Data dan Perangkat TIK, serta Seksi Persandian dan Keamanan Informasi. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek teknis, mulai dari ketersediaan jaringan, stabilitas sistem, hingga perlindungan data dapat dikelola secara optimal.

Melalui peran tersebut, Bidang Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian tidak hanya mendukung operasional internal pemerintahan, tetapi juga menjamin keberlangsungan layanan publik berbasis digital agar tetap stabil, aman, dan dapat diakses masyarakat secara luas. Dengan demikian, struktur organisasi Diskominfo dirancang untuk memastikan adanya koordinasi yang jelas antara fungsi kebijakan, pengembangan sistem, pengelolaan informasi, serta penyediaan dan pengamanan infrastruktur teknologi informasi [11].

2.3 Portofolio Perusahaan

Sebagai instansi pemerintah yang berperan dalam mendukung transformasi digital daerah, Diskominfo Kota Tangerang memiliki fokus pada pengembangan dan pengelolaan sistem informasi berbasis elektronik. Berdasarkan hasil observasi dan studi terhadap layanan yang tersedia, berikut adalah gambaran portofolio layanan utama yang dimiliki:

1. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi *e-Government*

Diskominfo Kota Tangerang berperan dalam mengembangkan serta mengelola berbagai aplikasi digital yang digunakan untuk menunjang pelayanan publik dan operasional internal pemerintah daerah. Salah satu contoh implementasinya adalah aplikasi Tangerang *LIVE* yang berfungsi sebagai *super apps* untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu platform, seperti layanan Administrasi, informasi kota, hingga pengaduan masyarakat. Selain itu, terdapat juga sistem LAKSA (Layanan Aspirasi Kotak Saran Anda) yang digunakan sebagai media pengaduan dan aspirasi masyarakat secara digital. Pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan akses layanan bagi masyarakat[10]

2. Pengelolaan Informasi Publik dan Media Digital

Selain pengembangan aplikasi, Diskominfo juga bertanggung jawab dalam pengelolaan dan diseminasi informasi publik melalui berbagai kanal digital. Kegiatan ini meliputi pengelolaan *website* resmi pemerintah daerah, publikasi berita dan rilis informasi, serta pengembangan media komunikasi seperti video dan konten digital. Salah satu bentuk implementasinya adalah portal resmi Pemerintah Kota Tangerang yang menyajikan informasi terkini terkait kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya[12].

3. Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem

Diskominfo Kota Tangerang juga menyediakan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang meliputi pengelolaan server, jaringan, serta pusat data pemerintah daerah. Selain itu, dilakukan pula integrasi antar sistem informasi yang digunakan oleh berbagai perangkat daerah agar data dapat terhubung secara optimal. Contohnya adalah integrasi layanan dalam platform Tangerang LIVE yang memungkinkan berbagai data dan layanan publik saling terhubung dalam satu ekosistem digital[10].

4. Pengelolaan Data dan Statistik Sektor

Dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data, Diskominfo memiliki peran dalam pengelolaan data dan statistik sektoral daerah. Kegiatan ini mencakup pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dari berbagai instansi pemerintah daerah. Data yang dihasilkan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi program pembangunan, sehingga keputusan yang diambil lebih terukur dan berbasis fakta di lapangan[12]